

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Belakang Penelitian

Proses pembangunan suatu negara dipengaruhi oleh sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki yang menimbulkan ketimpangan gender. Gender adalah konsep yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tetapi dibentuk oleh struktur sosial-budaya, politik dan ekonomi. Kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kondisi, perlakuan dan kesempatan yang sama dalam mewujudkan segala potensi yang dimiliki. Menurut UNICEF (2017) dalam Yoyo Karyono dkk. (2018) Kesetaraan gender terkait dengan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan, selain itu kesetaraan dan keadilan gender akan membuat semua penduduk laki-laki maupun perempuan menerima manfaat pembangunan.

Akan tetapi kaum perempuan dinilai hanya sebagai penerima pasif pembangunan karena perannya dalam proses pembangunan diabaikan, padahal penduduk adalah salah satu modal dasar dalam pembangunan ekonomi, tetapi adanya ketimpangan gender menjadikannya sebagai masalah sentral pembangunan. Isu kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi isu global dan sebagai salah satu tujuan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dilanjutkan dalam agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

dengan targetnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan. Adanya kesenjangan pencapaian dari pembangunan pada perempuan dan laki-laki menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih banyak terjadi hampir diseluruh aspek kehidupan.

Menurut *Feminist Government* perubahan yang terjadi dimasyarakat dapat didorong oleh kesetaraan gender. Meski demikian tingkat diskriminasi masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan membuat kaum perempuan menanggung beban lebih berat akibat ketidaksetaraan gender yang terjadi. Padahal pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi sangat diperlukan dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Menurut laporan *Global Gender Gap Report* tahun 2020 Indonesia berada diposisi ke 85 dari 153 negara yang disurvei oleh *World Economic Forum* (WEF). Hal tersebut memperlihatkan masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Indeks pertumbuhan yang berkaitan dengan gender adalah indeks pembangunan gender (IPG) yang mengukur pencapaian ketidaksetaraan dan pencapaian antara perempuan dan laki-laki (UNDP, 2004).

Tabel 1.1 IPG Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019

PROVINSI	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	91,67	91,67	91,84
SUMATERA UTARA	90,65	90,66	90,71
SUMATERA BARAT	94,16	94,17	94,09
RIAU	88,17	88,37	88,43
JAMBI	88,13	88,44	88,44
SUMATERA SELATAN	92,43	92,62	92,4
BENGGKULU	91,34	91,37	91,19

(1)	(2)	(3)	(4)
KEP. BANGKA BELITUNG	88,93	89,15	89
KEPULAUAN RIAU	92,96	92,97	93,1
DKI JAKARTA	94,7	94,7	94,71
JAWA BARAT	89,18	89,19	89,26
JAWA TENGAH	91,94	91,95	91,89
D I YOGYAKARTA	94,39	94,73	94,77
JAWA TIMUR	90,76	90,77	90,91
BANTEN	91,14	91,3	91,67
BALI	93,7	93,71	93,72
NUSA TENGGARA BARAT	90,36	90,37	90,4
NUSA TENGGARA TIMUR	92,44	92,57	92,72
KALIMANTAN BARAT	86,28	86,74	86,81
KALIMANTAN TENGAH	88,91	89,13	89,09
KALIMANTAN SELATAN	88,6	88,61	88,61
KALIMANTAN TIMUR	85,62	85,63	85,98
KALIMANTAN UTARA	85,96	86,74	87
SULAWESI UTARA	94,78	94,79	94,53
SULAWESI TENGAH	91,66	92,08	92,01
SULAWESI SELATAN	92,84	93,15	93,09
SULAWESI TENGGARA	90,24	90,24	90,56
GORONTALO	86,64	86,63	86,83
SULAWESI BARAT	89,44	90,05	89,76
MALUKU	92,75	93,03	93,04
MALUKU UTARA	89,15	89,5	89,61
PAPUA BARAT	82,42	82,47	82,74
PAPUA	79,38	80,11	80,05

Sumber: Badan Pusat Statistik

<https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg>.

Tabel 1.1 memperlihatkan terjadinya peningkatan angka indeks pembangunan gender di 34 provinsi Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan atau pemerataan gender di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2017-2019. Pada tahun 2019 Provinsi yang persentasinya paling tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 94,77% selanjutnya Provinsi DKI Jakarta sebesar 94,71% dan provinsi dengan IPG terendah yaitu Papua sebesar 80,05%.

Dalam proses pembangunan, kesehatan penduduk berkontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga *output* juga mengalami peningkatan. Untuk melihat adanya ketidaksetaraan gender dalam kesehatan dapat dilihat melalui angka harapan hidup (AHH) antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.2 Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2017-2019

PROVINSI	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ACEH	67,62	71,55	67,73	71,67	67,98	71,85
SUMATERA UTARA	66,49	70,29	66,73	70,52	67,07	70,92
SUMATERA BARAT	66,94	70,7	67,16	70,93	67,42	71,29
RIAU	69,12	72,92	69,32	73,12	69,62	73,43
JAMBI	68,75	72,67	68,89	72,8	69,11	72,97
SUMATERA SELATAN	67,29	71,17	67,52	71,4	67,78	71,63
BENGKULU	66,64	70,51	66,89	70,76	67,28	71,13
LAMPUNG	68,04	71,91	68,27	72,14	68,64	72,48
KEP. BANGKA BELITUNG	68,08	71,89	68,32	72,11	68,63	72,46
KEPULAUAN RIAU	67,6	71,4	67,76	71,56	67,92	71,73
DKI JAKARTA	70,78	74,41	70,87	74,56	70,96	74,68
JAWA BARAT	70,58	74,42	70,76	74,62	71,03	74,81
JAWA TENGAH	72,16	76,02	72,28	76,1	72,33	76,16
D I YOGYAKARTA	72,95	76,57	73,03	76,65	73,13	76,76
JAWA TIMUR	68,82	72,7	68,99	72,87	69,3	73,15
BANTEN	67,57	71,47	67,72	71,62	67,97	71,81
BALI	69,58	73,5	69,8	73,57	70,11	73,89
NUSA TENGGARA BARAT	63,7	67,42	63,88	67,75	64,32	68,16
NUSA TENGGARA TIMUR	64,2	67,96	64,51	68,28	64,98	68,81
KALIMANTAN BARAT	68	71,9	68,26	72,16	68,67	72,55
KALIMANTAN TENGAH	67,69	71,5	67,74	71,55	67,79	71,6
KALIMANTAN SELATAN	65,98	69,95	66,16	70,19	66,55	70,45
KALIMANTAN TIMUR	71,87	75,61	72,13	75,87	72,41	76,13
KALIMANTAN UTARA	70,5	74,34	70,52	74,37	70,57	74,4
SULAWESI UTARA	69,11	73,01	69,33	73,23	69,71	73,55
SULAWESI TENGAH	65,4	69,29	65,86	69,75	66,32	70,26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SULAWESI SELATAN	67,96	71,86	68,2	72,1	68,54	72,42
SULAWESI TENGGARA	68,57	72,47	68,83	72,71	69,2	73,12
GORONTALO	65,22	69,2	65,51	69,53	66,01	69,94
SULAWESI BARAT	62,52	66,23	62,76	66,47	62,96	66,78
MALUKU	63,49	67,39	63,68	67,58	63,95	67,79
MALUKU UTARA	65,56	69,53	65,82	69,79	66,25	70,17
PAPUA BARAT	63,34	67,19	63,57	67,43	64,01	67,78
PAPUA	63,45	67	63,67	67,22	63,87	67,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/08%2000:00:00/1114/-ipg-angka-harapan-hidup-ahh-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017>.

Pada Tabel 1.2 terlihat keadaan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan mengalami tren yang terus meningkat meskipun tidak signifikan. Provinsi dengan AHH terendah adalah Sulawesi Barat, sedangkan untuk AHH tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (baik untuk laki-laki maupun perempuan). AHH laki-laki cenderung lebih rendah dari pada AHH perempuan di setiap provinsi Indonesia yang disebabkan oleh kondisi biologis, struktur sosial dan perilaku.

Selanjutnya indikator pendidikan yang menjadi salah satu penentu kinerja ekonomi suatu negara, adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya terjadi (Klasen dan Lamanna, 2009). Untuk melihat ketidaksetaraan gender dalam pendidikan ini dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah (RLS) antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.3 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019

PROVINSI	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ACEH	9,36	8,62	9,49	8,71	9,52	8,85
SUMATERA UTARA	9,55	8,96	9,61	9,08	9,76	9,17
SUMATERA BARAT	8,86	8,6	8,87	8,66	9,07	8,77
RIAU	9,02	8,49	9,12	8,71	9,3	8,75
JAMBI	8,59	7,7	8,67	7,77	8,87	8,01
SUMATERA SELATAN	8,3	7,67	8,32	7,68	8,54	7,82
BENGKULU	8,76	8,16	8,93	8,28	9,1	8,34
LAMPUNG	8,08	7,49	8,14	7,5	8,3	7,52
KEP. BANGKA BELITUNG	8,1	7,48	8,17	7,51	8,38	7,54
KEPULAUAN RIAU	10	9,57	10,01	9,6	10,19	9,77
DKI JAKARTA	11,43	10,61	11,46	10,63	11,47	10,65
JAWA BARAT	8,59	7,69	8,6	7,71	8,83	7,9
JAWA TENGAH	7,79	6,78	7,86	6,87	8,06	7,03
D I YOGYAKARTA	9,74	8,73	9,87	8,8	9,92	8,87
JAWA TIMUR	7,93	6,78	7,96	6,85	8,18	7,04
BANTEN	9,07	7,98	9,18	8,04	9,22	8,24
BALI	9,35	7,75	9,5	7,82	9,66	8,03
NUSA TENGGARA BARAT	7,63	6,27	7,81	6,36	8,06	6,58
NUSA TENGGARA TIMUR	7,46	6,87	7,62	7	7,91	7,23
KALIMANTAN BARAT	7,59	6,49	7,61	6,62	7,81	6,79
KALIMANTAN TENGAH	8,62	7,91	8,7	8	8,83	8,16
KALIMANTAN SELATAN	8,45	7,52	8,46	7,53	8,68	7,7
KALIMANTAN TIMUR	9,75	8,93	9,86	9,06	10,11	9,25
KALIMANTAN UTARA	9,27	8,44	9,52	8,69	9,59	8,76
SULAWESI UTARA	9,1	9,19	9,24	9,24	9,46	9,39
SULAWESI TENGAH	8,56	8	8,76	8,27	8,98	8,5
SULAWESI SELATAN	8,31	7,63	8,32	7,76	8,57	7,95
SULAWESI TENGGARA	8,98	7,95	9,13	8,26	9,36	8,47
GORONTALO	6,98	7,56	7,14	7,76	7,37	8
SULAWESI BARAT	7,55	7,08	7,66	7,28	8	7,5
MALUKU	9,63	9,17	9,75	9,41	9,96	9,66
MALUKU UTARA	9,05	8,17	9,15	8,28	9,44	8,55
PAPUA BARAT	9,89	6,9	10,09	7,01	10,2	7,19
PAPUA	7,02	5,44	7,26	5,7	7,41	5,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017>.

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat keadaan RLS antara laki-laki dan perempuan di setiap provinsi Indonesia, secara tetap RLS laki-laki berada di atas RLS perempuan. Provinsi dengan RLS terendah yaitu Papua sedangkan untuk RLS tertinggi yaitu DKI Jakarta (baik untuk laki-laki dan perempuan). Hal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan, jika anak perempuan hanya mampu menempuh pendidikan sampai kelas 7,7 (kelas 1 SMP) anak laki-laki dapat menempuhnya sampai dengan kelas 8,4 (kelas 2 SMP).

Selain itu ketidaksetaraan gender dalam ketenagakerjaan membuat tenaga kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam berkontribusi disektor produksi formal. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik pembangunan dan menghambat kemajuan sosial ekonomi. Indikator dalam ketenagakerjaan dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019

PROVINSI	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ACEH	79,9	47,92	80,26	48,56	81,02	46,04
SUMATERA UTARA	82,56	55,55	83,98	59,97	83,9	56,8
SUMATERA BARAT	80,05	52,93	80,35	54,53	81,37	54,01
RIAU	83,45	43,43	83,77	45,66	83,73	45,45
JAMBI	84	50,28	84,26	51,95	84,34	47,03
SUMATERA SELATAN	84,94	53,63	83,41	53,56	83,35	51,94
BENGKULU	84,15	53,91	83,48	56,15	84,12	55,17
LAMPUNG	86,28	48,43	86,96	51,49	86,13	51,2
KEP. BANGKA BELITUNG	83,85	47,93	83,81	50,19	85,39	48,25
KEPULAUAN RIAU	82,21	49,96	82,68	46,18	83,92	44,86

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI JAKARTA	78,48	45,56	79,57	48,47	81,79	48,02
JAWA BARAT	82,4	43,89	83,09	42,37	83,38	46,45
JAWA TENGAH	82,46	56,26	81,19	56,41	82,43	55,33
DI YOGYAKARTA	80,72	62,69	82,69	64,42	81,95	64,28
JAWA TIMUR	83,85	54,37	83,96	55,43	84,31	55,22
BANTEN	81,15	42,8	81,4	44,93	82,49	45,9
BALI	82,76	67,7	83,13	70,41	81,84	65,86
NUSA TENGGARA BARAT	82,11	56,18	78,83	54,25	82,09	56,46
NUSA TENGGARA TIMUR	80	58,65	80,96	59,86	78,92	58,52
KALIMANTAN BARAT	83,38	53,38	83,74	53,06	83,24	52,87
KALIMANTAN TENGAH	84,37	49,19	86,29	51,94	85,84	51,6
KALIMANTAN SELATAN	84,82	54,99	84,68	55,52	83,77	54,68
KALIMANTAN TIMUR	82,85	42,33	82,49	45,35	83,43	47,41
KALIMANTAN UTARA	84,73	49,02	82,87	50,2	83,98	45,7
SULAWESI UTARA	79,28	41,7	80,08	45,26	81,76	45,27
SULAWESI TENGAH	84,1	49,49	84,52	53,92	84,22	50,32
SULAWESI SELATAN	79,66	43,76	80,15	47,19	80,41	46,71
SULAWESI TENGGARA	82,58	54,93	83,66	55,97	83,06	55,13
GORONTALO	83,07	46,71	83,53	51,31	84,08	49,72
SULAWESI BARAT	84,23	49,86	83,55	53,57	86,01	52,66
MALUKU	75,19	45,16	76,16	49,6	75,92	50,14
MALUKU UTARA	80,25	46,36	80,04	49,79	80,76	47,59
PAPUA BARAT	78,69	54,66	81,51	52,41	81,45	53,26
PAPUA	85,28	67,45	86,39	70,8	86	66,7

Sumber: *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, diolah.*

Pada Tabel 1.4 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan keadaan yang konsisten dari TPAK laki-laki yang berada jauh di atas perempuan di 34 provinsi Indonesia. Provinsi dengan TPAK laki-laki tertinggi yaitu Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Papua sedangkan TPAK perempuan terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau, Banten, Aceh dan Sulawesi Utara. Adanya perbedaan kontribusi perempuan dan laki-laki dalam ketenagakerjaan disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yaitu faktor sosial

yang membuat laki-laki lebih cepat terlibat dalam perekonomian ketika sudah memasuki usia kerja dari pada perempuan.

Selanjutnya, pendapatan per kapita menjadi indikator yang mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan dan dipandang sebagai gambaran tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Selain masalah pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, pembangunan ekonomi juga mempunyai komponen penting lain berupa perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Berikut pendapatan per kapita di setiap provinsi Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 1.5.

**Tabel 1.5 Pendapatan Per Kapita di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2017-2019
(dalam Rupiah)**

PROVINSI	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	23.362.900	24.013.810	24.590.280
SUMATERA UTARA	34.183.580	35.570.710	37.048.910
SUMATERA BARAT	29.312.170	30.477.760	31.669.590
RIAU	70.740.430	70.750.520	71.122.210
JAMBI	38.833.870	40.044.090	41.181.230
SUMATERA SELATAN	34.059.710	35.670.040	37.260.590
BENGKULU	21.751.640	22.498.430	23.276.150
LAMPUNG	26.614.880	27.741.250	28.935.180
KEP. BANGKA BELITUNG	34.933.520	35.767.100	36.238.140
KEP. RIAU	79.743.680	81.293.050	83.202.100
DKI JAKARTA	157.636.600	165.872.430	174.136.560
JAWA BARAT	27.970.920	29.161.390	30.247.470
JAWA TENGAH	26.088.910	27.287.370	28.575.950
DI YOGYAKARTA	24.533.800	25.776.380	27.190.100
JAWA TIMUR	37.724.290	39.588.240	41.566.750
BANTEN	32.947.600	34.202.020	35.430.610
BALI	34.129.840	35.905.000	37.534.430
NUSA TENGGARA BARAT	19.091.260	18.028.940	18.541.930
NUSA TENGGARA TIMUR	11.863.410	12.276.770	12.714.420
KALIMANTAN BARAT	25.198.010	26.109.120	27.050.260

(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN TENGAH	34.370.630	35.561.450	36.992.220
KALIMANTAN SELATAN	29.578.790	30.624.440	31.412.550
KALIMANTAN TIMUR	126.625.190	127.389.560	130.858.980
KALIMANTAN UTARA	78.918.570	80.732.380	83.307.510
SULAWESI UTARA	32.297.080	33.915.160	35.512.060
SULAWESI TENGAH	32.860.480	34.411.330	36.346.510
SULAWESI SELATAN	33.234.110	35.248.910	37.351.280
SULAWESI TENGGARA	31.894.420	33.285.690	34.782.730
GORONTALO	21.477.780	22.540.240	23.642.220
SULAWESI BARAT	22.001.010	22.951.020	23.816.980
MALUKU	15.942.450	16.612.470	17.255.130
MALUKU UTARA	19.192.970	20.322.460	21.171.080
PAPUA BARAT	62.169.960	64.498.120	64.682.890
PAPUA	45.577.050	48.093.020	39.853.690

Sumber: Badan Pusat Statistik

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/958/PDRB-per-kapita-menurut-provinsi-2010-2019>.

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat pendapatan per kapita pada setiap provinsi rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun terdapat provinsi yang mengalami penurunan. Untuk tahun 2019 provinsi dengan pendapatan per kapita tertinggi yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan provinsi dengan pendapatan per kapita terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Tabel 1. 6 IPM, IPG dan Pendapatan Per kapita Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019

PROVINSI	IPM	IPG	Selisih	Pendapatan Per Kapita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	71,90	91,84	19,94	24.590.280
SUMATERA UTARA	71,74	90,71	18,97	37.048.910
SUMATERA BARAT	72,39	94,09	21,7	31.669.590
RIAU	73	88,43	15,43	71.122.210
JAMBI	71,26	88,44	17,18	41.181.230
SUMATERA SELATAN	70,02	92,4	22,38	37.260.590

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BENGKULU	71,21	91,19	19,98	23.276.150
LAMPUNG	69,57	90,39	20,82	28.935.180
KEP. BANGKA BELITUNG	71,3	89	17,7	36.238.140
KEP. RIAU	75,48	93,1	17,62	83.202.100
DKI JAKARTA	80,76	94,71	13,95	174.136.560
JAWA BARAT	72,03	89,26	17,23	30.247.470
JAWA TENGAH	71,73	91,89	20,16	28.575.950
DI YOGYAKARTA	79,99	94,77	14,78	27.190.100
JAWA TIMUR	71,5	90,91	19,41	41.566.750
BANTEN	72,44	91,67	19,23	35.430.610
BALI	75,38	93,72	18,34	37.534.430
NUSA TENGGARA BARAT	68,14	90,4	22,26	18.541.930
NUSA TENGGARA TIMUR	65,23	92,72	27,49	12.714.420
KALIMANTAN BARAT	67,65	86,81	19,16	27.050.260
KALIMANTAN TENGAH	70,91	89,09	18,18	36.992.220
KALIMANTAN SELATAN	70,72	88,61	17,89	31.412.550
KALIMANTAN UTARA	76,61	85,98	9,37	130.858.980
SULAWESI UTARA	71,15	87	15,85	83.307.510
SULAWESI TENGAH	72,99	94,53	21,54	35.512.060
SULAWESI SELATAN	69,5	92,01	22,51	36.346.510
KALIMANTAN TIMUR	71,66	93,09	21,43	37.351.280
SULAWESI SELATAN	71,2	90,56	19,36	34.782.730
SULAWESI TENGGARA	68,49	86,83	18,34	23.642.220
GORONTALO	65,73	89,76	24,03	23.816.980
SULAWESI BARAT	69,45	93,04	23,59	17.255.130
MALUKU	68,7	89,61	20,91	21.171.080
MALUKU UTARA	64,7	82,74	18,04	64.682.890
PAPUA BARAT	60,84	80,05	19,21	39.853.690
PAPUA	71,21	91,19	19,98	36.992.220

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Berdasarkan uraian dari Tabel 1.6 terlihat bahwa sebagian provinsi yang memiliki kesetaraan gender tinggi memiliki pendapatan per kapita yang tinggi antara lain Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Begitu juga sebaliknya provinsi dengan kesetaraan gender yang rendah memiliki pendapatan per kapita yang rendah seperti Provinsi Maluku Utara. Sehubungan dengan fenomena yang

sudah diuraikan maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Kesetaraan Gender terhadap Pendapatan Per Kapita Indonesia Tahun 2015-2019”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh rasio angka harapan hidup, rasio rata-rata lama sekolah, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan secara parsial terhadap pendapatan per kapita Indonesia tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh rasio angka harapan hidup, rasio rata-rata lama sekolah, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan secara bersama-sama terhadap pendapatan per kapita Indonesia tahun 2015-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berawal dari pertanyaan yang ingin diidentifikasi oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh rasio antara angka harapan hidup, rasio rata-rata lama sekolah, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan secara parsial terhadap pendapatan per kapita Indonesia tahun 2015-2019.
2. Mengetahui pengaruh antara rasio angka harapan hidup, rasio rata-rata lama sekolah, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan

perempuan secara bersama-sama terhadap pendapatan per kapita Indonesia tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terapan Ilmu Pengetahuan

a. Bagi Mahasiswa

Untuk memperoleh dan menambah wawasan mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi bagi lingkungan akademik khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

c. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah khususnya dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan gender di 34 Provinsi Indonesia.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan memberikan manfaat serta menjadi bahan perbandingan khususnya dalam hal mempelajari kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi di Indonesia

e. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 34 Provinsi Indonesia dengan mengakses website Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) melalui situs www.bps.go.id, website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui situs www.kemenpppa.go.id dan *United Nations Development Programme* melalui situs www.undp.org.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan sejak Bulan November 2020 sampai dengan Bulan April 2021. Penelitian ini dimulai dengan pengajuan judul sampai dengan sidang skripsi. Berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel 1.7 di bawah ini:

